

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perempuan dianggap sebagai individu kedua dan ter subordinasi dalam dunia politik. Ideologi patriarki yang mewujud dalam konstruksi masyarakat, menjadikan budaya politik yang tidak menguntungkan bagi perempuan. *Affirmative action* menjadi sebuah langkah stimulus yang bersifat sementara dalam menyeimbangkan partisipasi perempuan di bidang politik, melalui diterapkannya kebijakan kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada pencalonan anggota legislatif (caleg). Jumlah keterwakilan perempuan anggota DPRD Kota Surabaya tahun 2009 secara normatifnya sesuai dengan amanat UU No.10 Tahun 2008 telah menunjukkan keterwakilan partisipasi politik perempuan sebesar 30%. Namun, angka yang ditampilkan, tidak serta merta mampu merepresentasikan secara substantif relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang adil. Misalnya dalam angka keterwakilan perempuan DPRD Surabaya, pada beberapa partai politik masih belum mampu merepresentasikan keterwakilan perempuan 30 persen.

Relasi/hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara (*asymetric relationship*), hal ini disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin” (*direction*) atau apa yang oleh Weber disebut “pengawas yang mengandung perintah” (*imperative control*) (Poelinggomang, 2004:138). Berbicara mengenai sebuah interaksi antara perempuan dan politik, tidak lepas dari hubungan/relasi gender di dalamnya.

Peran dan posisi perempuan dalam masyarakat adalah hasil dari konstruksi pemikiran masyarakat yang mengatur kehidupan perempuan, bagaimana perempuan dibentuk, bagaimana peranan perempuan dalam masyarakat. Peran perempuan tersebut juga berhubungan dengan pengaturan kehidupan laki-laki di dalamnya. Peranan dari hubungan keduanya juga dihasilkan oleh konstruksi peran dan posisi sosial perempuan dan laki-laki yang berasal dari konstruksi dan budaya masyarakat. Peran gender tersebut, kemudian melahirkan relasi gender.

Relasi gender merupakan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial (Wiyatmi, 2008:6). Sebuah relasi gender, kelompok gender tertentu dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi (mendominasi) dan ada yang didominasi, namun ada pula yang setara. Tetapi, dalam masyarakat patriarki, laki-laki dianggap memiliki kedudukan yang dominan, sementara perempuan berada dalam subordinat. Oleh karena itu, relasi kekuasaan yang terjadi pada perempuan dengan dunia politik berhubungan dengan bagaimana relasi gender yang turut mengatur didalamnya.

Menurut Sylvia Walby (dalam Nasaruddin Umar, 1999: 53), Patriarki berekspansi merubah, baik pemegang struktur kekuasaan dan kondisi sosial masyarakat di masing-masing wilayah menjadi milik satu tangan individu yaitu laki-laki pada semua ranah, baik pada ranah privat maupun publik dan membudaya dalam setiap bidang di masyarakat. Politik sebagai sistem pemerintahan yang telah ada sejak masa Aristoteles memiliki sebuah mekanisme tunggal yakni dibentuk dan digunakan laki-laki, sedangkan perempuan secara kodratnya hanya untuk dikuasai (Dalam Andayani, 2009:15).

Konstruksi sosial yang berkembang saat ini, peran perempuan sudah mulai diakui keberadaannya dalam ruang publik, namun tetap tidak meninggalkan kewajibannya pada ruang domestik. Konstruksi tersebut berimplikasi pada melemahnya kekuatan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, yaitu dalam hal ini menjadi anggota legislatif. Menurut Hotman (2014), hanya perempuan yang telah menyelesaikan persoalan domestik atau tidak berurusan dengan dunia domestik berani untuk terjun berpolitik. Pada rapat DPR misalnya biasanya dilakukan pada malam hari hingga pagi harinya. Mekanisme partai yang demikian, hanya mampu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang selesai urusan domestiknya. Perempuan yang belum menikah atau belum mempunyai anak juga mampu mengikuti mekanisme demikian. Contohnya seperti Indah Kurnia, Indah Kurnia berani dan mampu terjun menjadi anggota DPR karena anak-anaknya sudah besar dan bisa hidup mandiri. Seperti dalam temuan penelitian sebelumnya mengenai Akomodasi Parpol Terhadap Kuota Perempuan (Windyastuti, 2004) menyatakan bahwa, partai politik hampir tidak pernah melihat perempuan sebagai elemen kekuatan partai yang diperhitungkan. Mekanisme dan budaya kerja partai politik tidak memberikan peluang kepada caleg perempuan untuk dapat menang/lolos pemilu legislatif.

Menurut John L. Esposito (1994), Demokrasi merupakan kekuasaan dari dan untuk rakyat. Siapapun dan dari mana asal latar belakangnya, patut diberikan jaminan atas keadilan dan penyamarataan di segala bidang kehidupan, begitupun di dunia politik. Jaminan persamaan seluruh warga negara tanpa perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang pemerintahan dan hukum semenjak dulu telah ada. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1

yang mengakui persamaan kedudukan seluruh warga negara di mata hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali (Rosidawati, 2013).

Hingga sejak tahun 2003, muncul kebijakan afirmatif pada perempuan di bidang politik. Kebijakan Afirmatif merupakan langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan ( CEDAW PBB Pasal 4 dalam Rosida, 2005). UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 Pasal 65 Dan Pasal 67 Ayat 1, UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 55, serta Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Legislatif Pasal 11, menyatakan adanya kebijakan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dengan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai mekanisme parpol, dengan ketentuan dalam setiap 3 calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang calon perempuan. Dalam konteks politik tindakan afirmatif diharapkan dapat mendorong jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Tindakan afirmatif dapat membantu mewujudkan relasi kuasa yang seimbang kepada para caleg perempuan dalam ranah politik. Tindakan afirmatif mendorong perempuan mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, dengan permasalahan dan kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki.

Kota Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Surabaya juga disebut sebagai kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Surabaya sebagai pusat pemerintahan, menjadi rujukan barometer demokrasi untuk banyak kota lainnya di Jawa Timur. Wali kota perempuan, salah satunya turut merepresentasikan bagaimana demokrasi dan relasi yang seimbang pada kondisi politik Surabaya. Surabaya sebagai sebuah kota dengan kondisi sosial dan politik yang sudah maju,

seharusnya mampu mempresentasikan relasi gender yang juga seimbang pada ranah kursi legislatif. Berikut ini adalah data anggota DPRD Surabaya dari tahun 2009–2014 berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1.1  
Jumlah anggota DPRD Surabaya Periode 2009–2014 Berdasarkan Jenis Kelamin

Partai	Jumlah	L	%	P	%
PDIP	7	5	71,43	2	28,57
GOLKAR	5	5	100	-	0
DEMOKRAT	15	9	60	6	40
PKS	5	4	80	1	20
PAN	3	2	66,67	1	33,33
PKB	6	5	83,33	1	16,67
PKNU	1	-	0	1	100
PDS	4	3	75	1	25
PPP	1	1	100	-	0
GERINDRA	3	1	33,33	2	66,67
Jumlah	50	35	70	15	30

*Data : KPU Kota Surabaya, 2009. Sudah diolah*

Apabila dilihat secara kuantitatifnya, DPRD Kota Surabaya pada periode 2009–2014 sudah merepresentasikan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Namun, kenyataannya tidak semua partai merepresentasikan keterwakilan perempuan. Bahkan tidak hanya pada partai politik berideologi agama saja yang tidak merepresentasikan. Partai yang berideologikan nasionalis sekalipun juga belum mampu merepresentasikan keterwakilan perempuan. Hal ini berarti bahwa gambaran kondisi kota Surabaya yang modern, demokratis, dan sebagai pusat pemerintahan, masih menyisakan beberapa masalah terkait relasi kekuasaan yang terjadi dikalangan para caleg perempuan.

Relasi gender merupakan hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari bentukan konstruksi masyarakat. Relasi gender yang mewujudkan bukanlah relasi yang dihasilkan dari bentukan sederhana dan beberapa waktu saja. Namun, relasi gender mewujudkan dan terlanggengkan secara sistematis



selama kurun waktu yang lama. Patriarki juga menjadi ideologi yang mengakar dan sistematis. Patriarki sebagai sebuah ideologi, senantiasa akan melakukan sebuah upaya untuk melanggengkan ideologinya dalam masyarakat. Jumlah keterwakilan perempuan yang menggambarkan secara normatif relasi kuasa yang nampak seimbang, namun di tengah wacana dan budaya politik yang berkembang secara patriarki menjadi sebuah keunikan bagi penulis untuk melakukan penelitian terhadap hal ini. Penelitian yang berusaha untuk mengungkap realitas yang nampak di balik angka keterwakilan partisipasi perempuan DPRD Surabaya. Realitas yang nampak dengan angka tersebut, apakah juga menampakkan realitas di luar yang juga sama menggambarkan secara substantif relasi kekuasaan di kalangan caleg perempuan yang adil. Oleh karena itu dalam penelitian ini membahas mengenai relasi kekuasaan diantara caleg perempuan dalam pemilu legislatif DPRD Surabaya 2014. Di mana dalam setiap periodenya memiliki perkembangan wacana di masyarakat dan dalam setiap periodenya memiliki pembaharuan aturan dan nilai yang mengatur mengenai pemilu legislatif. Sehingga apa yang terjadi pada periode yang lalu menjadi cerminan kondisi pada periode selanjutnya namun tetap dalam suatu kondisi yang mengalami pembaharuan.

## **1.2. Fokus Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas, fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana relasi kekuasaan di kalangan calon anggota legislatif perempuan dalam upaya kemenangan pemilihan umum legislatif DPRD Surabaya periode 2014-2019?”

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini dapat mengetahui relasi kekuasaan di kalangan caleg perempuan dalam upaya kemenangan pemilu legislatif DPRD Kota Surabaya 2014.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis. Berikut uraiannya :

#### 1. Manfaat akademis

Dari aspek teoritik, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji, mengembangkan dan melakukan refleksi terhadap keberlakuan teori relasi kekuasaan dengan konteks pengalaman kehidupan calon anggota legislatif perempuan pada saat pemilu legislatif.

Dari aspek sosiologis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah pengetahuan bagi ilmu Sosiologi, khususnya Sosiologi Politik, Sosiologi Gender, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan dalam politik, dalam menciptakan usaha – usaha strategis bagi para calon anggota legislatif perempuan untuk dapat lolos sebagai anggota legislative terpilih.

#### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini penting dilakukan agar dapat lebih sensitif terhadap harapan, kekhawatiran, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh caleg perempuan ketika memperjuangkan haknya masuk dalam parlemen.

Selain itu kepada masyarakat secara umum, khususnya keluarga dan pemilih, untuk bisa lebih terbuka wawasannya untuk peduli dengan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan caleg perempuan dalam memperjuangkan hak mereka.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 Teori Relasi Kekuasaan – Michel Foucault

Michel Foucault adalah salah satu pemikir post-modernis, post-strukturalis. Pemikiran Foucault terletak pada isu-isu kemanusiaan, marginalitas, ketidaknormalan, dan pandangannya tentang kebenaran. Foucault menyatakan bahwa pengetahuan dan kekuasaan pada dasarnya saling berkaitan erat. Kebenaran yang ada di dalam masyarakat berhubungan secara langsung dengan genealogi kekuasaan. Genealogi adalah sebuah cara untuk menganalisis berbagai perlintasan wacana, praktik, peristiwa yang jamak, dengan akhir yang terbuka, heterogen, hubungan yang terpolakan tanpa perlu menggunakan rezim kebenaran yang mengklaim hukum pseudo-alamiah atau hubungan global (Ritzer, 2012:1044).

*“kekuasaan menghasilkan pengetahuan.... Kekuasaan dan pengetahuan saling terkait... tidak ada hubungan kekuasaan tanpa pembentukan yang terkait dengan bidang pengetahuan, dan tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan serta tidak membentuk sekaligus hubungan kekuasaan” (Surveiller et Punir dalam Haryatmoko, 2000:223).*

Buku pertama Foucault yang berjudul *The History of Sexuality*, memusatkan perhatian pada relasi kekuasaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seksualitas perempuan. Seksualitas menjadi titik perpindahan secara



khusus yang padat bagi relasi kekuasaan. Kekuasaan seksualitas tidak bertempat dalam satu lingkup sumber utama, namun berada di berbagai pengaturan. Kekuasaan seksualitas atas kehidupan memiliki dua bentuk (Ritzer, 2012:1055). Pertama, kekuasaan politik-anatomis tubuh manusia. Kekuasaan mendisiplinkan tubuh manusia dan seksualitasnya. Kedua, kekuasaan terhadap bio-politik populasi, dimana kekuasaan mengendalikan dan mengatur pertumbuhan populasi, kesehatan, harap hidup, dan sebagainya. Adanya kedua kekuasaan tersebut, muncul kesadaran yang dilihat oleh masyarakat bahwa kehidupan sebagai obyek politik.

Foucault mengatakan bahwa penguasaan terhadap perempuan pada awalnya berasal dari penguasaan laki-laki atas tubuh perempuan. Pengetahuan yang cukup tentang seksualitas, menjadikan masyarakat menggunakan kekuasaan yang lebih besar dalam kehidupan mereka sendiri. Konsep diskursus seksualitas dalam dunia sosial yang dipahami dari Foucault berarti bahwa segala sesuatu yang dapat menjadikan seorang dalam konstruksi yang melekat pada perempuan menjadi berkuasa, berdaya, atau sebaliknya. Seperti misalnya seorang istri yang merayu suaminya dengan suara yang lembut untuk diberikan uang belanja tambahan. Lembutnya suara, gerak-gerik tubuh perempuan dapat mempengaruhi kehendak dari laki-laki. Dengan demikian, tidak hanya dipahami penguasaan seksualitas adalah yang berkenaan dengan fisik tubuh perempuan saja, tapi hal – hal yang melekat pada diri perempuan.

Foucault memiliki beberapa kerangka dasar dalam menerangkan pandangannya tentang kekuasaan, dari beberapa sudut pandang yakni arti kekuasaan, strategi dan mekanisme kekuasaan serta hubungan antara

pengetahuan dan kekuasaan. Foucault sama sekali tidak mendefinisikan secara konseptual apa itu kekuasaan tetapi lebih menekankan bagaimana kekuasaan itu dipraktikan, diterima dan dilihat sebagai kebenaran dan berfungsi dalam berbagai bidang kehidupan (Kebung, 2008 : 212). Foucault melihat kekuasaan bukanlah sebagai sesuatu yang dimiliki. Kekuasaan adalah sebuah strategi, sebuah kata kerja, bukan kata benda.

*Power must be analysed as something which circulates, or as something which only functions in the form of a chain... power is employed and exercised through a netlike organization... individuals are the vehicles of power, not its point of application.*  
(dalam Yunitamurti, 2015:24).

Konsep kekuasaan tersebut mengandung pengertian bahwa kekuasaan berfungsi dalam sebuah jalinan atau relasi, bukan hanya sebagai hubungan antara menindas dan ditindas. Jalinan tersebut mewujud dalam suatu relasi yang berlangsung terus-menerus. Relasi kuasa bisa berupa hubungan keluarga, hubungan yang terjadi dalam suatu institusi, dan lain sebagainya. Individu bukan dilihat sebagai objek yang menerima praktek kekuasaan, tetapi harus dilihat sebagai aktor yang ikut „bertarung“ atau dilihat sebagai „tempat“ dimana kekuasaan itu ditetapkan dan ditentang (Mills dalam Yunitamurti, 2015:25). Dalam arti inilah, kekuasaan tidak hanya disempitkan dalam ruang lingkup tertentu atau menjadi milik orang atau institusi tertentu seperti pandangan umum bahwa kekuasaan itu selalu dikaitkan dengan negara atau institusi pemerintah tertentu. Namun kekuasaan sebagai suatu yang niscaya selalu hadir dalam setiap interaksi manusia. Relasi kekuasaan tidak dilihat sebagai suatu yang linier atau *vertical*, yang diopresi dari atas ke bawah yang digunakan untuk menindas.

Kekuasaan dilihat sebagai suatu potensi yang bersikulasi terus-menerus membentuk kreatifitas dan produktifitas budaya.

Foucault mengatakan “kuasa tidak selalu bekerja melalui represif dan intimidasi melainkan pertama-tama bekerja melalui aturan-aturan dan normalisasi” (Kebung, 2008:121). Kekuasaan selalu hadir dalam aturan-aturan, sistem-sistem regulasi. Di mana saja manusia juga memiliki hubungan tertentu. Dalam hal ini kemudian kuasa bekerja. Kekuasaan tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan-aturan, dan hubungan dari dalam (Foucault dalam Yunitamurti, 2015:25). Dengan adanya normalisasi/pendisiplinan diri kemudian, Foucault menyebut menghasilkan bentuk *subjection* (penyerahan diri kepada seseorang) seperti seorang pasien kepada psikiater. Tujuan dari adanya mekanisme kekuasaan ialah membentuk setiap individu untuk memiliki dedikasi dan disiplin diri agar menjadi pribadi yang produktif (Haryatmoko, 2003 : 22). Segala hukum dan aturan diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun bagi Foucault, kekuasaan bukan suatu yang absolut, melainkan diperebutkan terus menerus dalam sebuah relasi kuasa. *„where there is power, there is resistance”* (dalam Yunitamurti, 2015:26). Hal ini berarti bahwa kekuasaan sendiri juga dianggap sebagai kemampuan untuk melawan resistensi.

Gambar 1.1

## Skema Konsep Relasi Kekuasaan – Foucault



Hubungan antara teori relasi kekuasaan dengan konseptualisasi permasalahan penelitian mengenai relasi kekuasaan di kalangan caleg perempuan dalam upaya pemenangan pemilu adalah konsep relasi kekuasaan yang dijelaskan oleh Foucault mewujud dalam praktik pemilu legislatif, dimana caleg perempuan sebagai subyek yang ikut bertarung dalam menentang/menetapkan kekuasaan ataupun caleg perempuan sebagai subyek yang mengalami *subjection*, menyerahkan diri mereka terbawa arus pada subyek lain yang berkaitan dengan penguasaan wacana kekuasaan politik yang berkembang di masyarakat. Konsep relasi kekuasaan yang menggunakan model relasi kekuasaan berdasarkan

seksualitas menurut Foucault menunjukkan dua hal, hal yang bermanfaat dan hal yang memberikan kerugian bagi perempuan. Caleg perempuan sebagai seorang individu memiliki kekuasaan untuk membuat wacana diskursus tandingan dibalik kekuasaan seksualitas. Hal ini berarti bahwa, caleg perempuan dapat membuat dan menetapkan wacana baru untuk membangun kekuatan tandingan dalam upayanya memenangkan pemilu legislatif. Seperti misalnya, membuat wacana baru untuk pemilih perempuan memilih sesama perempuan. Selain membuat wacana baru, caleg perempuan dapat memanfaatkan wacana diskursus seksualitas untuk pemanangan pemilu legislatif. Contohnya menampilkan foto yang cantik pada kertas suara, menunjukkan lemah lembutnya untuk mendekati pemilih perempuan

Relasi kekuasaan seksualitas yang ditunjukkan Foucault tidak hanya menghasilkan relasi yang bermanfaat bagi para caleg. Namun sebagai seorang perempuan, relasi kekuasaan yang ditunjukkan juga berdampak buruk bagi caleg perempuan. Wacana diskursus tersebut mendominasi laki-laki dalam bidang politik. Sedangkan, perempuan didominasi dalam politik karena diskursus seksualitasnya. Stereotip negatif pada perempuan yang hanya terampil dalam ranah domestik, caleg perempuan hanya menjadi kosmetika kekuasaan bagi keluarganya, menjadikan caleg perempuan tidak dapat memperjuangkan dirinya sendiri dengan kesadarannya.

Kekuasaan berada di mana-mana, artinya kekuasaan itu bukan terdapat pada struktur atau siapa yang memegang jabatan tinggi, strategis, khusus di masyarakat. Namun, kekuasaan berada di mana-mana, setiap ada interaksi, setiap adanya pola hubungan, di situ terdapat kekuasaan. Maka, hubungan yang terjadi



dalam setiap tahapan pemenangan pemilu, mulai dari tahapan persiapan, pendaftaran caleg, penentuan nomor urut dan dapil, kampanye politik, dan pemungutan serta perhitungan suara.

Kekuasaan yang ditunjukkan sebagai sebuah kekuasaan tidak hanya berfokus kepada siapa yang berkuasa dan yang dikuasai dalam aktivitas pemenangan, seperti contohnya dalam masa kampanye caleg perempuan yang menguasai pemilih atau sebaliknya. Namun, juga mencakup konsep relasi kekuasaan yang dijelaskan oleh Foucault merupakan pembahasan kekuasaan memiliki cakupan yang lebih luas. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan yang kemudian menjadi wacana dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial di masyarakat hingga dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam hal ini, pemilu sebagai masa kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan berupa jabatan tidak lepas dari peranan subyek yang menciptakan/menghasilkan pengetahuan wacana politik yang berkembang di masyarakat dan bagaimana perwujudan pengetahuan atau wacana politik yang berkembang. Kekuasaan berupa kekuatan atas praktik-praktik sosial dari wacana politik yang berkembang, baik yang kemudian mewujudkan dalam bentuk menguntungkan pemenangan caleg pada pemilu legislatif ataupun menghambat pemenangan caleg perempuan. Selain itu apakah kemudian praktik-praktik wacana politik yang berkembang pada masa pemilu, direspon oleh caleg perempuan sebagai sebuah resistensi yang menghasilkan penolakan atas wacana tersebut sehingga tidak ikut bertarung/terlibat mengikuti wacana yang ada ataukah kemudian praktik wacana tersebut diterima dengan baik oleh caleg perempuan sehingga memutuskan tindakan politik untuk menjadi bagian dari subyek yang mengikuti wacana tersebut dan siap untuk bertarung

menghadapi kompetisi pemilu dengan melarutkan diri bertindak sesuai dengan praktik wacana yang berkembang.

Praktik wacana yang berkembang di masyarakat dan dianggap sebagai kebenaran dinormalisasikan/didisiplinkan oleh peran nilai dan aturan–aturan sebagaimana dijelaskan oleh Foucault, maka dalam penelitian ini juga dapat melihat bentuk praktek dari nilai dan aturan yang berhasil menormalisasikan/mendisiplinkan caleg perempuan kemudian larut bergabung melakukan praktik wacana berkembang di masyarakat atau dalam bahasa Foucault sebagai *subjection*. Hal itu juga senada dengan praktik peran nilai dan aturan yang tidak berhasil/gagal mendisiplinkan diri caleg perempuan untuk mengambil tindakan *subjection* pada wacana kekuasaan yang berkembang.

Seseorang ketika memutuskan untuk mendaftarkan diri mereka menjadi caleg, kursi legislatif menjadi motivasi utamanya. Caleg perempuan melakukan hal–hal yang mengarah pada kemenangan dan mendapatkan jatah kursi, mulai dari persiapan dana, penyusunan strategi kampanye dan pengawalan suara. Cara atau strategi kemenangan ini kemudian yang menjadi alat analisis untuk dapat melihat praktik wacana yang berkembang di masyarakat dan relasinya dengan caleg perempuan, peran nilai dan aturan dalam mendisiplinkan caleg perempuan untuk mengatur kekuasaannya, dan kemudian relasi kekuasaan yang ditunjukkan oleh caleg perempuan dari strategi kemenangan tersebut menolak atau menetapkan bergabung dengan kekuasaan. Strategi kemenangan caleg perempuan tentu tidak lepas dari pengetahuan yang dimilikinya mengenai bagaimana caranya untuk bisa menang dan mendapatkan suara terbanyak. Seperti halnya konsep Foucault bahwa pengetahuan menjadi sumber kekuasaan yang berhasil diwacanakan. Pengetahuan

yang dimiliki oleh caleg perempuan kemudian dapat dijadikan premis/asumsi dasar wacana yang berkembang di masyarakat, mengenai aktor yang terlibat/ yang dihadapi oleh caleg perempuan, karakter subyek yang dihadapi, kepentingan subyek, dan penyikapan subyek terhadap tindakan politik caleg perempuan.

### 1.5.2 Studi Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan Beberapa hasil penelitian terdahulu oleh Beberapa peneliti yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan tema yang diteliti penulis, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Windyastuti tahun 2006, dengan judul Akomodasi Partai Politik Terhadap Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2004, pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa secara kuantitatif hampir 60% partai telah mengakomodasi kuota perempuan dalam daftar caleg pemilu 2004 secara nasional, sedangkan dalam daftar caleg wilayah Surabaya yang mengakomodasi perempuan menjadi caleg masih kurang dari 30%. Pemenuhan kuota 30% tidak ditindaklanjuti dengan keadilan dalam penetapan di setiap Daerah Pemilihan. Perempuan cenderung diadu pada satu Daerah Pemilihan daripada pemerataan perempuan di seluruh Daerah Pemilihan. Hambatan yang seringkali ditemui caleg perempuan untuk memenangkan dan terakomodir dengan baik kepentingannya disebabkan model maskulin dalam kehidupan politik dan badan-badan politik yang digunakannya. Kurangnya komitmen partai politik untuk mengakomodir perempuan seringkali dengan alasan karena kurangnya kader perempuan yang berkualitas di partai, walaupun persyaratan itu tidak pernah diperuntukkan pada caleg laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Arista tahun 2011, berjudul Perempuan di Parlemen Pola Rekrutmen Parpol Terhadap Caleg Perempuan di DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2009 – 2014, pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa pola rekrutmen yang dilakukan tidak menggunakan pola rekrutmen yang baku namun berdasarkan situasi dan kondisi wilayah/pasar parpol itu sendiri, melakukan rekrutmen terbuka bagi para perempuan non kader partai untuk bisa ikut dalam daftar caleg parpol, atau juga berdasarkan kriteria massa yang dimilikinya, kemampuan finansial yang dimiliki caleg perempuan, dan merekrut perempuan yang mau dijadikan caleg dalam partai mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Octavia P pada tahun 2010, dengan judul Pemenuhan Kuota 30% Perempuan Dalam Pileg (Studi Kasus Respon Parpol Dalam Pemenuhan Kuota 30% Perempuan Dalam Pileg di Dua Partai Kota Surabaya Periode 2009-2014), penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya partisipasi perempuan yang muncul dari kesadaran perempuan untuk terlibat langsung pada partai juga tidak terlepas dari partainya sendiri yang mendorong kesadaran bagi para perempuan untuk terlibat dalam parpol. Pola rekrutmen yang terjadi pada dua parpol yang diteliti menunjukkan adanya pola yang sama, di mana tiap ranting diberikan hak untuk mengeluarkan satu nama dengan persetujuan cabang, lalu nama tersebut dibawa ke tingkat pusat untuk diambil satu nama calon yang diusung pada satu daerah. Pola tersebut disebut juga pola yang berorientasi birokrasi).

Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Yusuf Pambudi pada tahun 2012, dengan judul penelitian Perempuan dan Politik Studi Tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif Di Kabupaten Sampang, menjelaskan

bahwa posisi perempuan dalam struktur sosial di Kabupaten Sampang masih menempatkan perempuan sebagai makhluk nomor dua, terlihat dari salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Sampang adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Sampang, yakni *bhuppa* - *bhabhu* - *ghuru-rato*, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak-ibu-guru (kyai)-ratu (pemerintah). Keikutsertaan perempuan di dunia politik di Kabupaten Sampang masih didasari karena latar belakang keluarga yang memang sudah secara turun temurun menguasai sumber-sumber politik yang ada, perempuan yang terjun di dunia politik di Kabupaten Sampang adalah memang berlatarbelakang sebagai seorang aktivis atau tokoh perempuan yang telah berkecimpung dalam organisasi perempuan, perempuan yang terjun ke dunia politik di Kabupaten Sampang hanyalah sebagai pelengkap saja, sebagai formalitas persyaratan administratif kuota 30%. Hambatan yang ditemui perempuan selama proses pencalonannya sebagai caleg dan pada saat berkampanye di masyarakat adalah, dominasi elit parpol yang mayoritas adalah laki-laki dengan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak strategis pada kepengurusan, sehingga perempuan memiliki sedikit peran untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, penempatan caleg perempuan pada nomor urut buncit dan pada dapil yang bukan "wilayahnya" juga dapat merugikan caleg perempuan dari segi perolehan suara, fungsi parpol untuk memberikan pendidikan politik dan sosialisasi politik yang sesuai dengan ketentuan tidak dijalankan, dan adanya kecurangan yang dilakukan oknum-oknum yang berambisi dengan menghalalkan segala cara untuk menjadi anggota legislatif terpilih seperti dengan politik uang untuk memuluskan jalannya ke kursi legislatif.



Studi terdahulu yang masih relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berjudul Pemaknaan Politik Pemilih Perempuan Pada Pileg 2009 Kota Surabaya, yang diteliti oleh Aldania R pada tahun 2012, menjelaskan bahwa pemilih perempuan tidak serta merta memilih caleg perempuan meski mendukung upaya perempuan yang ikut dalam proses pemilu berdasar pandangan agama, budaya, kurangnya kepercayaan pemilih perempuan dengan potensi dan tanggung jawab lebih yang dimiliki caleg perempuan kurang daripada caleg laki-laki, juga didukung dengan karakter yang berbeda. Pemilih perempuan lebih menitikberatkan pada kapabilitas calon.

Jika dilihat pada penelitian yang sebelumnya dilakukan diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pada penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan analisis penelitiannya lebih kepada analisis dan kesimpulan pada pendekatan teoritik-teoritik politik, pembahasan mengenai pemilu yang menitikberatkan relasi perempuan pada relasi kekuasaan politik. Selain itu juga pada penelitian sebelumnya hanya melihat permasalahan caleg perempuan pada sudut pandang secara praktis yang terlihat pada kenampakan peristiwa politik apa yang nampak dan terjadi pada caleg perempuan. Sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh penulis kali ini hendak melihat permasalahan yang dihadapi caleg perempuan dengan perspektif sosiologi, yaitu pada perwujudan relasi kekuasaan dalam pemilu yang masih identik dengan „wilayah laki-laki“, sehingga lebih melihat fenomena nilai-nilai patriarki yang ada dibalik kenampakan kejadian-kejadian politik yang dihadapi para perempuan untuk bisa maju sebagai anggota legislatif melalui pemilihan umum legislatif, dimulai dari pendaftaran, penentuan nomor urut, masa kampanye, masa pemungutan dan

perolehan suara. Selain itu secara praktis, pada penelitian ini meneliti peristiwa perpolitikan pemilihan umum legislatif yang terjadi pada perodesasi 2014–2019 yang belum pernah ada penelitian sebelumnya.

## 1.6 Batasan Konsep

Pada sub bab ini dijelaskan mengenai batasan konseptual pada perumusan masalah yang dapat menciptakan dan membatasi data–data yang didapatkan di lapangan dapat digunakan atau tidak. Konsep memiliki pengertian yang lebih menyeluruh dan sangat penting bagi ilmu, karena konsep ini dikorelasikan dengan konsep lain yang berhubungan.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan konseptual yang digunakan sebagai pedoman kedalaman, sentral dan kesesuaian data yang tela diperoleh selama penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan agar data yang didapatkan dapat terarah sesuai dengan fokus permasalahan penelitian yang dibahas. Batasan konseptual ini antara lain :

### 1. Relasi Kekuasaan

Relasi kekuasaan merupakan hubungan seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Penelitian ini membahas permasalahan relasi kekuasaan caleg perempuan dan orang lain, lembaga atau hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas pengaruh dan mempengaruhi untuk memenangkan caleg perempuan dalam pemilu legislatif. Contohnya, untuk dapat memenangkan pemilu caleg perempuan harus mendapatkan suara terbanyak. Hal ini berarti bahwa caleg perempuan harus melakukan strategi pemenangan yang dapat menghasilkan suara

terbanyak, baik melalui mendekati diri ke konstituen, berkampanye, atau bahkan membeli suara dari pemilih atau dari petugas penyelenggara pemilu. Hal ini berarti bahwa caleg perempuan memiliki relasi yang dapat mempengaruhi pemilih, petugas penyelenggara pemilu, dan pengetahuannya mengenai strategi pemilu. pernyataan tersebut senada dengan konsep relasi kekuasaan menurut Foucault yang menjadi pisau analisis pada penelitian ini, bahwa relasi kekuasaan berkenaan dengan pengetahuan/wacana yang terpraktikkan, produktifitas budaya, wacana yang menjadi kebenaran.

## 2. Caleg (Calon anggota legislatif) perempuan

Caleg merupakan warga negara yang telah berusia 21 tahun atau lebih, secara sah/legal terdaftar sebagai peserta pemilu dari partai politik tertentu dan berkehendak untuk mendapatkan kursi legislatif. Perempuan merupakan seseorang yang memiliki identitas berjenis kelamin dengan ciri-ciri fisik yang ditunjukkannya. Sehingga caleg perempuan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah warga negara yang telah berusia 21 tahun atau lebih, berjenis kelamin perempuan yang dinyatakan sah menjadi peserta pemilu dari partai politik tertentu dan memiliki motivasi untuk lolos menjadi anggota legislatif, khususnya dalam hal ini adalah DPRD Kota Surabaya.

## 3. Strategi kemenangan

Strategi merupakan langkah, cara untuk mencapai tujuan. Kemenangan yaitu bentuk kata kerja yang menunjuk pada usaha untuk menang. Maka dalam hal ini menang sebagai tujuan dan strategi menunjuk pada cara. Maka strategi kemenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala cara,

segala langkah yang dilakukan oleh caleg perempuan untuk dapat mencapai kemenangan, yaitu lolos menjadi anggota legislatif terpilih.

#### 4. Pemilu Legislatif

Undang–Undang no.8 tahun 2012 pada pasal 1 ayat 1 tentang pemilihan umum, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahapan penyelenggaraan pemilu, meliputi (UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif :

- a. perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;

Berdasarkan tahapan – tahapan proses pemilu menurut UU No.8 tahun 2012 tersebut dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu legislatif, baik dilakukan oleh KPU, partai politik, PANWASLU, maupun calon anggota legislative (caleg). Namun dalam penelitian ini, membatasi ruang lingkup pemilu legislatif hanya pada tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota legislative, sesuai

dengan rumusan penelitian. Adapun secara khusus tahapan pemilu yang dilakukan oleh caleg, yaitu yang berkaitan dengan pendaftaran dan verifikasi sebagai peserta pemilu, masa kampanye pemilu, masa pemungutan dan perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu.

## 1.7 Metodologi Penelitian

Pada sub bab mengenai Metode Penelitian ini, menjelaskan tentang paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, *setting* sosial penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis datanya untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai relasi kekuasaan caleg perempuan dalam pemenangan pemilu legislatif DPRD Kota Surabaya 2014.

### 1.7.1 Paradigma dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan relasi kekuasaan caleg perempuan dalam upaya pemenangan pemilu legislatif. Relasi kekuasaan yang terjadi pada caleg untuk dapat memenangkan pemilu dilihat pada beberapa tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran, penentuan nomor urut, kampanye politik, hingga pemungutan dan perolehan suara.

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik atau interpretatif. Paradigma ini digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada mengenai relasi kekuasaan yang muncul di kalangan caleg perempuan dalam upaya pemenangan, melalui pemaknaan dan analisis dari sebuah interaksi yang berlangsung antar-caleg perempuan, caleg perempuan dengan caleg laki-laki,



caleg perempuan dengan partai politik, caleg perempuan dengan lembaga penyelenggara pemilu, caleg perempuan dengan keluarga, caleg perempuan dengan tim sukses, dan caleg perempuan dengan pemilih. Selain itu, metodologi kajian ini juga menggunakan perspektif gender yang menempatkan isu relasi gender dalam kehidupan kekuasaan yang digambarkan dalam politik, khususnya pemilu legislatif. Di mana dalam penelitian ini, mengungkap lebih dari sekedar relasi kekuasaan perempuan dengan relasi kekuasaan politik, tapi relasi gender diantara banyak hal yang terkait mengatur kehidupan perempuan dan laki-laki dalam dunia politik.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan Bogdan dalam Bagong dan Sutinah, 2010;175).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dikarenakan fenomena yang muncul menggunakan logika induktif. Logika induktif merupakan logika berpikir untuk pengambilan permasalahan yang ada dimulai dari keunikan permasalahan di lapangan. Kemudian dilakukan analisis dari generalisasi tersebut sesuatu hal yang unik dan spesifik untuk memunculkan preposisi-preposisi sebagai awal pembentukan kesimpulan. Penelitian ini menjelaskan data secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subyek penelitian. Pertanyaan tersebut berkenaan dengan *what, who, where, why, when,* dan *how*.

### 1.7.2 *Setting* Sosial Penelitian

*Setting* sosial penelitian ini adalah para caleg perempuan, tim sukses, dan pemilih perempuan di Kota Surabaya dari berbagai dapil dan partai politik yang berbeda-beda. *Setting* sosial ini muncul dari kondisi fenomena permasalahan di lapangan. Fenomena permasalahan tersebut muncul dari relasi gender yang terjadi pada caleg perempuan. Wacana perempuan sebagai subyek politik kedua setelah laki-laki, dianggap kedudukan caleg perempuan masih sulit untuk bisa lolos menjadi anggota legislatif. Meskipun *affirmative action* dibuat untuk membantu partisipasi politik perempuan.

Kota Surabaya merupakan kota terbesar/metropolitan kedua setelah Jakarta dengan pembangunan yang modern. Modernitas kota Surabaya seharusnya menggambarkan keadaan kota yang terbuka wacana dan pemikirannya mengenai peran perempuan di ranah publik telah diakui dan dimajukan. Selain itu sebagai pusat pemerintahan, dimungkinkan kota ini menjadi rujukan atau gambaran pemerintahan yang terwarnai di Provinsi Jawa Timur, dimana penduduknya terbesar di Pulau Jawa. Kenyataan di lapangan, wali Kota Surabaya adalah perempuan, menjadikan keunikan sendiri pada kota ini. Wali kota perempuan mampu untuk membuat sedikit gambaran bagaimana relasi kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang mewujud di kota ini.

Wacana politik tersebut nampaknya dalam kondisi sosial kota Surabaya tidak terimplementasikan dengan baik. Karena sejak periode 2009 hingga sekarang keterwakilan perempuan anggota DPRD Kota Surabaya sudah mencapai angka 30%. Apabila dilihat secara kuantitatif memang angka yang terlihat sudah terbuka dengan partisipasi politik perempuan, namun apakah kemudian dalam

realitasnya di lapangan caleg perempuan sudah mendapatkan relasi kekuasaan yang adil baginya. Dan hal ini juga membuktikan adanya sesuatu di luar wacana yang berkembang di masyarakat, mampu memberikan kekuatan bagi perempuan untuk bisa menang dalam pemilu legislatif.

### 1.7.3 Subyek Penelitian

Subyek yang dipilih dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang diketahui sebelumnya. Dalam pemilihan subyek ini, didasarkan atas pertimbangan. Pertama, mereka menguasai dan memahami sesuatu bukan sekedar diketahui tapi juga dihayati yaitu terkait relasi yang mengatur atas kehidupan perempuan dan laki-laki dibidang politik.. Kedua mereka berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang diteliti yaitu menjadi caleg perempuan maupun tim sukses atau pemilih. Ketiga mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu memadai untuk dimintai informasi.

Proses pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball, dimana peneliti mendapatkan data informan dari informan pertama ke informan selanjutnya. Peneliti mendapatkan data informan pertama dari DA (selaku tim sukses EC), lalu mendapatkan data informan EC, RA, CH, dan seterusnya. Berdasarkan dinamika dan pengalaman yang terjadi di lapangan dengan asumsi waktu, tenaga, dan kesediaan subyek untuk memberikan data, dan hasil yang diharapkan bisa mewakili dan mampu menjelaskan permasalahan penelitian. Informan subyek pada penelitian ini, yaitu caleg perempuan dari latar belakang partai politik yang berbeda, caleg perempuan yang berlatar belakang profesi berbeda, caleg perempuan yang baru berkecimpung di dunia politik atau

incumbent, dan caleg perempuan yang berasal dari nomor dan daerah pemilihan (dapil) yang berbeda – beda. Sedangkan informan non subyeknya yaitu pemilih perempuan, keluarga caleg perempuan, dan tim sukses caleg perempuan.

Adapun berdasarkan kriteria informan di atas, profil informan yang menjadi subyek penelitian ini, yaitu :

**Tabel 1.2**  
**Profil informan**

Jenis informan	Nama	Profil
Informan subyek	1. Bu EC (Caleg partai segitiga terbalik/mercy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caleg jadi/lolos</li> <li>- Caleg yang baru mendaftar pada periode 2014–2019</li> <li>- Berasal dari ibu rumah tangga yang bersuamikan mantan ketua DPRD Jatim 2009–2014. Mempunyai 1 anak laki-laki berumur 16 tahun.</li> <li>- Pengalaman politiknya hanya pada saat dahulu menemani suami bertugas.</li> <li>- Caleg dari partai yang berideologi plural/tengah dan pada periode sebelumnya mendapat jatah kursi terbanyak</li> <li>- Caleg dari dapil 3 nomor urut 3. Dapil tidak sesuai dengan tempat tinggalnya yang berlokasi di rungkut.</li> </ul>
	2. Bu RA (Caleg partai islam berwarna kuning-hitam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caleg jadi/lolos dan incumbent dari periode 2004-2019</li> <li>- Ibu dengan 4 anak (usia 1, 6, 10, 13) dan bersuamikan dosen teknik</li> <li>- Pengalaman politiknya mulai dari semasa perkuliahan hingga sekarang</li> <li>- Kader aktif perempuan terbaik partai, sebelum menjadi anggota DPRD menjabat sebagai Ketua Bidang Pengembangan Wanita di partainya</li> <li>- Berasal dari partai agamis</li> <li>- Berasal dari dapil 4 nomor urut 1 berdasarkan tempat tinggalnya</li> </ul>
	3. Bu CH (partai ka"bah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caleg lolos</li> <li>- Caleg incumbent yang pindah partai karena partai sebelumnya tidak lolos PT</li> <li>- Tokoh agama</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caleg dari partai yang berideologi agamis dan termasuk partai agamis terbesar di Surabaya</li> <li>- Caleg dari dapil 2 nomor 3</li> </ul>
	4. Bu DJ (partai berlambang ka'bah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caleg gagal/tidak lolos</li> <li>- Caleg yang baru mendaftar pada periode 2014–2019</li> <li>- Berasal dari pekerja EO yang bersuamikan pekerja Bank dengan 2 anak berumur 7 dan 9 tahun</li> <li>- Pengalaman politiknya baru pada saat mencalonkan diri menjadi caleg</li> <li>- Caleg dari partai yang berideologi agamis dan termasuk partai agamis terbesar di Surabaya</li> <li>- Caleg dari dapil 3 nomor urut 5. Dapil tidak sesuai dengan tempat tinggalnya yang berlokasi di kutasari.</li> </ul>
	5. Bu RD (caleg dari partai pohon beringin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caleg gagal/tidak lolos</li> <li>- Kiprahnya yang aktif bergerak di dunia keperempuanan, sosial kemasyarakatan</li> <li>- Pada periode 2009–2014 mencalonkan diri dan juga tidak lolos</li> <li>- Berasal dari partai tengah/plural dan partai terbesar di tingkat nasional</li> <li>- Berasal dari dapil 5 nomor urut 1</li> <li>- Pengurus partai selaku wakil ketua DPC Kota</li> <li>- Suami lawyer</li> <li>- Memiliki 2 anak yang sudah berkeluarga semua.</li> <li>- Orang tua juga berlatarbelakang partai yang sama di tingkatan provinsi</li> </ul>
Informan non subyek	6. NRS (pemilih perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa ilmu sosial berusia 21 tahun</li> <li>- Aktif dalam kegiatan keorganisasian HIMA</li> <li>- pengalaman mencoblos selama tiga kali, mulai dari pemilihan Gubernur Jawa Timur, pemilihan Wali Kota Surabaya, dan pemilihan Presiden sebelum pemilu 2014 kemarin</li> <li>- bertempat tinggal di dapil 2</li> <li>- memilih caleg perempuan dari partai berlambang matahari warna biru – putih</li> </ul>
	7. DA (tim sukses)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tim sukses Bu EC</li> <li>- Bergabung menjadi tim sukses EC sejak akhir 2013</li> <li>- Sekarang tim ahli Bu EC</li> </ul>



	8. JH (pemilih perempuan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mahasiswa ilmu sosial berusia 21 tahun</li> <li>- pengalaman mencoblos selama tiga kali, mulai dari pemilihan Gubernur Jawa Timur, pemilihan Wali Kota Surabaya, dan pemilihan Presiden sebelum pemilu 2014 kemarin</li> <li>- memilih caleg perempuan yang terkenal</li> <li>- menolak politik uang ketika diberi oleh salah satu caleg</li> <li>- bertempat tinggal di dapil 3</li> </ul>
	9. RH (keluarga dari CH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keponakan dari CH</li> <li>- Mahasiswa ilmu politik</li> <li>- Berusia 20 tahun</li> <li>- Selalu menggunakan hak politiknya untuk memilih</li> <li>- Dalam keluarganya terdapat dua orang yang mencalonkan diri menjadi caleg, baik dari laki-laki dan perempuan</li> <li>- Keluarga inti dari RH mendukung dan membantu pemenangan saudaranya caleg perempuan</li> <li>- Bertempat tinggal di dapil 2</li> </ul>

#### 1.7.4 Proses Pengambilan Data

Proses pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu dengan Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*). Wawancara dilakukan secara tersusun dengan berorientasi pada pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan penelitian agar tidak keluar dari bahasan yang telah ditentukan. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan berdasarkan pedoman wawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan kemudian dianalisis.

### 1.7.5 Proses Analisis Data

Data yang diperoleh dengan *in-depth interview* atau wawancara mendalam di lapangan, pertama-tama dituliskan dalam bentuk transkrip wawancara dan catatan penting yang ada di lapangan. Setelah ditranskrip semua hasil wawancara dijadikan satu dalam sebuah matriks agar mempermudah dalam mereduksi data–data yang dipergunakan untuk dianalisis. Lalu data tersebut dapat direduksi atau *mapping* sesuai dengan kategorisasi–kategorisasi untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Dari data hasil reduksi atau *mapping*, kemudian dilakukan penyajian data sekaligus melakukan analisis dan menggambarkan secara rinci dan akurat terhadap hasil pengamatan dan wawancara yang ada di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menjawab permasalahan penelitian dan memastikan tidak ada data penting yang terlewat untuk dianalisis. Data yang tersaji kemudian dapat dianalisis dan diinterpretasikan secara teoritik untuk selanjutnya menghasilkan proposisi–proposisi untuk membantu dan mengarahkan proses penarikan kesimpulan dari keseluruhan data yang telah disajikan untuk menjawab fokus permasalahan yang telah dibuat.